



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 100.3.3.1/K.317/2025

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 100.3.3.1/K.618/2024 TENTANG PENETAPAN PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Perencanaan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- b. bahwa penetapan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2025 telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.1.1/K.618/2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.1.1/K.153/2025, namun karena ada usulan penetapan Peraturan Kepala Daerah yang mendesak, maka dipandang perlu mengubah Keputusan Gubernur dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.618/2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Keenam Atas Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.618/2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2025, dengan daftar usulan judul Peraturan Gubernur sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 27 Oktober 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



NO	PEMRAKASA	JUDUL RAPERDA
1	2	3
1	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	DANA ABADI DAERAH BIDANG PERUMAHAN
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029
3	Dinas Pariwisata	Pramuwisata
4	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Transmigrasi
5	Badan Pendapatan Daerah	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
6	Badan Pendapatan Daerah	Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2025

MATERI POKOK	STATUS	
	BARU	UBAH/ CABUT
4	5	6
Kebijakan Pembiayaan Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui Dana Abadi Daerah (DAD) Bidang Perumahan di Provinsi Kaltim	Baru	-
Penjabaran dari Visi, Misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah	Baru	-
Agar menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan penataan dan pembinaan pramuwisata di daerah secara terencana dan menjadi standar kualitas pelayanan dan citra pariwisata secara keseluruhan	Baru	-
Pelaksanaan Transmigrasi di Kalimantan Timur	Cabut	
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah Penerimaan Daerah selain Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Baru	-
Penyesuaian Objek, rincian objek dan detail rincian objek baru pada lampiran Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Baru	-

RENCANA PELAKSANA	UNIT/PD/Instansi Terkait	TARGET PENYAMPAIAN
7	8	9
Tahun 2025	-	Tahun 2025
Tahun 2025	-	Tahun 2025
Tahun 2025	-	Tahun 2025
2015	Kementerian Desa, Bappeda, BPN, Dinas PUPR, Dinas Pertanian	Tahun 2025
Tahun 2025	-	Tahun 2025
Tahun 2025	-	Tahun 2025

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 100.3.3.1/K.317/2025
TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.618/2024 TENTANG PENETAPAN
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025

DAFTAR PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025

NO	PEMRAKASA	JUDUL RAPERGUB	MATERI POKOK	STATUS		RENCANA PELAKSANA	UNIT/PD/Instansi Terkait	TARGET PENYAMPAIAN
				BARU	UBAH/ CABUT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Biro Organisasi Setda Prov.Kaltim	Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah	Terdapat penyesuaian Fungsi dan Uraian Tugas pada beberapa Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	UBAH	Tahun 2025	-	TAHUN 2025
2	Biro Organisasi Setda Prov.Kaltim	Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja UPTD	Terdapat penyesuaian Fungsi dan Uraian Tugas serta pembentukan UPTD pada beberapa Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	UBAH	Tahun 2025	-	TAHUN 2025
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kaltim	Tata Cara Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan Pekerja Sawit	Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan	BARU	-	Tahun 2025	-	TAHUN 2025
4	Biro Perekonomian Setda Prov. Kaltim	Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah	berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah disebutkan bahwa pengadaan barang dan/atau jasa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	BARU	-	Tahun 2025	-	TAHUN 2025
5	Badan Perencanaan Pembangunan DaerahProv. Kaltim	Tata Cara Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Tahunan Provinsi Kalimantan Timur	Penyusunan petunjuk teknis tata cara perencanaan pembangunan tahunan daerah merupakan turunan operasional dari pelaksanaan amanat Permendagri 86 Tahun 2017 dalam lingkup penyusunan RKPD dan perubahan RKPD, termasuk di dalamnya substansi mengenai mekanisme penyampaian dan pembahasanaspirasi pokok-pokok pikiran DPRD dan aspirasi masyarakat yang di entry melalui aplikasi SIPD-RI.	BARU	-	Tahun 2025	-	TAHUN 2025
6	Biro Organisasi Setda Prov.Kaltim	Tata Cara Pemberian, Pemotongan, Penghentian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur		BARU	-	Tahun 2025	-	TAHUN 2025

7	Dinas Pariwisata Prov. Kaltim	Pengembangan Desa Wisata	Dapat menjadi acuan terstandarisasi bagi pemerintah daerah tentang definisi, pencanangan, penilaian, penetapan, dan pengukuhan desa menjadi Desa Wisata	BARU	-	Tahun 2025	-	TAHUN 2025
8	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. Kaltim	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025		-	UBAH	Tahun 2025	-	TAHUN 2025
9	Badan Pendapatan Daerah Prov. Kaltim	Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Sesuai Ketentuan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	BARU	-	Tahun 2025	-	TAHUN 2025
10	Badan Pendapatan Daerah Prov. Kaltim	Dasar Pengenaan Pajak Alat Berat Tahun 2024	Sesuai Ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2024 tentang Dasar Pengenaan PKB, BBNKB dan PAB Tahun 2024	BARU	-	Tahun 2025	-	TAHUN 2025
11	Badan Pendapatan Daerah Prov. Kaltim	Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang tidak tercantum di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2025	Sesuai Ketentuan Pasal 18 ayat(4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2024 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat Tahun 2024	BARU	-	Tahun 2025	-	TAHUN 2025
12	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. Kaltim	Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur nomor 5 tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah	untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3), pasal 73, Pasal 96, Pasal 85 ayat (2), Pasal 87 ayat (5), Pasal 91 ayat (6), Pasal 94 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, penyusunan, pengajuan, penetapan dan perubahan RBA BLUD, pelaksanaan anggaran, pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran Badan Layanan Umum Daerah, tata cara penghapusan piutang, mekanisme pengajuan utang/piutang jangka pendek, tata cara kerjasama dengan pihak lain, Pengelolaan Inventasi BLUD		UBAH	Tahun 2025	-	TAHUN 2025
13	BPKAD Prov. Kaltim	Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026		BARU	-	Tahun 2025	-	TAHUN 2025
14	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Prov. Kaltim	Pemberian Insentif dan Disinsentif Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi Kalimantan Timur	Pada aspek pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya Tata Ruang sesuai ATR, salah satu bentuk pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui pemberian insentif dan disinsentif	BARU	-	Tahun 2025	-	TAHUN 2025
15	Dinas Perhubungan Prov. Kaltim	Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi Kaltim tahun 2024-2043		BARU	-	Tahun 2025	-	TAHUN 2025
16	Dinas Lingkungan Hidup Prov Kaltim	Tata Cara Pemberian Persetujuan Terhadap Lokasi dalam Rangka Kegiatan Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan di Provinsi Kalimantan Timur	dalam rangka mewujudkan tertib administrasi penyelenggaraan perdagangan karbon Sektor Kehutanan pada Kawasan Gambut dan/atau Kawasan Mangrove yang berada diluar Kawasan Hutan dan/atau Hutan Negara yang bukan merupakan Kawasan Hutan	BARU	-	Tahun 2025	-	TAHUN 2025
17	Dinas Lingkungan Hidup Prov Kaltim	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon	dalam pelaksanaannya masih perlu dilakukan penyempurnaan terkait kewenangan pemerintah provinsi dalam pelaksanaan penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon, yakni pada hutan Negara yang bukan merupakan kawasan hutan		UBAH	Tahun 2025	-	TAHUN 2025

18	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kaltim	Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Daerah pada Jenjang Sekolah Menengah, Sekolah Luar Biasa dan Madrasah Aliyah	dalam rangka tatakelola keuangan pada satuan pendidikan yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menuju tercapainya pengelolaan keuangan yang berdayaguna dan berhasilguna, maka dipandang perlu ditetapkan pengelolaan keuangan satuan pendidikan yang terstruktur, transparan dan akuntabel	BARU	-	Tahun 2025	-	TAHUN 2025
19	Dinas Perkebunan Prov.Kaltim	Tata Cara Pengolahan Hasil Perkebunan	untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan	BARU	-	Tahun 2025	-	TAHUN 2025
20	Dinas Perkebunan Prov.Kaltim	Pelaksanaan Kemitraan Usaha Perkebunan	untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (7), Pasal 62 ayat (3) dan Pasal 72 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan	BARU	-	Tahun 2025	-	TAHUN 2025
21	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Prov. Kaltim	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	Terbitnya Perpres 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah dimana ada peraturan yang sudah tidak sesuai pada Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan di Provinsi Kalimantan Timur	BARU	-	Tahun 2025	-	TAHUN 2025
22	Biro Hukum Setda Prov. Kaltim	Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi hukum dan keterbukaan informasi produk hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat	BARU	-	Tahun 2025	-	TAHUN 2025
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Kaltim	Kajian Resiko Bencana	untuk melaksanakan program penanggulangan bencana daerah perlu menetapkan Kajian Resiko Bencana Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2026 yang penyusunannya mengacu pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Resiko Bencana	BARU	-	Tahun 2025	-	TAHUN 2025
24	Badan Pendapatan Daerah Prov. Kaltim	Tata Cara Pemungutan Pajak Air Permukaan	untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	BARU	-	Tahun 2025	-	TAHUN 2025
25	Badan Pendapatan Daerah Prov. Kaltim	Pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pembayaran Atas Pokok Pajak Daerah dan/atau Sanksinya	untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (4), dan Pasal 90 ayat (11) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	BARU	-	Tahun 2025	-	TAHUN 2025
26	Badan Pendapatan Daerah Prov. Kaltim	Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dibawah Tahun 2024	untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2024 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat tahun 2024	BARU	-	Tahun 2025	-	TAHUN 2025
27	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kaltim	Gerakan Menanam Satu Pohon Satu Siswa Jenjang Pendidikan Menengah	dalam rangka pemulihan fungsi lahan dan pelestarian lingkungan hidup sebagai penyangga kehidupan serta meningkatkan peran dan menanamkan rasa cinta lingkungan hidup kepada siswa, maka perlu mendorong seluruh siswa jenjang pendidikan menengah di Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan penanaman pohon	BARU	-	Tahun 2025	-	TAHUN 2025

28	Biro Kesra Prov. Kaltim	Penetapan Klasifikasi Pekerja Rentan yang Masuk Kategori Miskin/Miskin Ekstrem	berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 mengamanatkan Penetapan Klasifikasi pekerja Rentan dan/atau yang masuk sebagai kategori miskin/miskin ekstrem yang menerima bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Peraturan Kepala Daerah	BARU	-	Tahun 2025	-	TAHUN 2025
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Kaltim	Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi Kalimantan Timur	untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (7), Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	BARU	-	Tahun 2025	-	TAHUN 2025
30	Biro Kesra Prov. Kaltim	Program Pendidikan Gratispol Generasi Emas	dalam upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, dipandang perlu memberi kesempatan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kualifikasi pendidikannya melalui Program Pembiayaan Pendidikan Gratispol Generasi Emas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	BARU	-	Tahun 2025	-	TAHUN 2025
31	Dinas Kesehatan Prov. Kaltim	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis dan Bermutu Bagi Penduduk Provinsi Kalimantan Timur	dalam rangka menjalankan amanah Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, menegaskan bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan gratis dan bermutu bagi penduduk Kalimantan Timur, maka perlu adanya penjaminan pembiayaan yang memadai	BARU	-	Tahun 2025	-	TAHUN 2025
32	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kaltim	Pengelolaan Sekolah Unggulan pada Jenjang Menengah	sebagai pedoman penerapan pengelolaan sekolah unggulan pada jenjang menengah	BARU	-	Tahun 2025	-	TAHUN 2025
33	Biro Kesra Prov. Kaltim	Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RAK-LLAJ) Provinsi Kalimantan Timur	1. Kewajiban Pemerintah Daerah dalam menyusun Dokumen RAK LLAJ; 2. Menyiapkan pedoman bagi pemangku kebijakan dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan penanganan KLLAJ di tingkah provinsi; 3. Menjadi acuan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam penyusunan dokumen RAK LLAJ kabupaten/kota	BARU	-	Tahun 2025	-	TAHUN 2025
34	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Prov. Kaltim	Pengembangan Kewirausahaan Terpadu	Mendukung Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Timur yang termasuk didalam Program ke 4 Jospol (9 program strategis) yaitu mendorong ekonomi inklusif berbasis ekonomi kreatif dan digital untuk mendukung umkm	BARU	-	Tahun 2025	-	TAHUN 2025
35	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Prov. Kaltim	Gratis Biaya Administrasi Pembiayaan Pemilikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Tingginya angka backlog di Provinsi Kalimantan Timur: 1. Masih rendahnya akses MBR untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni baik membeli dari pengembang maupun membangun secara mandiri/swadaya; dan 2. sebagai upaya menyediakan akses pemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Provinsi Kalimantan Timur, maka diperlukan Inovasi Daerah dalam memberikan bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR melalui Program Gratis Administrasi Pembelian Rumah	BARU	-	Tahun 2025	-	TAHUN 2025

36	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kaltim	Pedoman Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru Jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	1. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan	BARU	-	Tahun 2025	-	TAHUN 2025
37	Biro Perekonomian Setda Prov. Kaltim	Pola Tata Kelola, Rencana Strategis dan Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelayanan Teknis Daerah Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya	bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2), Pasal 41 ayat (2), Pasal 43 ayat (2) Peraturan Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah Pola Tata Kelola, Rencana Strategis dan Standar Palayanan Minimal diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	BARU	-	Tahun 2025	-	TAHUN 2025
38	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Prov. Kaltim	Fasilitasi Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	Menindaklanjuti Instruksi Presiden tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	BARU	-	Tahun 2025	-	TAHUN 2025
39	Biro Kesra Prov. Kaltim	Pedoman Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah	bahwa untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat, infak dan sedekah bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah, perlu memberikan pedoman dalam pelaksanaannya	BARU	-	Tahun 2025	-	TAHUN 2025
40	Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kaltim	Penugasan BUMD Perseroan Terbatas Kalimantan Timur Melati Bhakti Satya (Perseroda) Dalam Pengelolaan Wisma Atlet	bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan aset berupa Wisma Atlet, Pemerintah Daerah dapat memberikan Penugasan Kepada BUMD.	BARU	-	Tahun 2025	-	TAHUN 2025
41	Biro Perekonomian Setda Prov. Kaltim	Penerimaan Hibah pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelayanan Teknis Daerah Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya	bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, dalam pengelolaan BLUD UPTD dapat menerima hibah dari pihak ketiga dalam pengelolaan Unit usaha	BARU	-	Tahun 2025	-	TAHUN 2025
42	Biro Kesra Prov. Kaltim	Lembaga Kebudayaan Daerah	dalam upaya pemajuan, pembinaan dan pengembangan kesenian dan kebudayaan yang mengandung nilai-nilai luhur dan spiritual, ilmu pengetahuan, serta memiliki manfaat tinggi, kesenian di Kalimantan Timur perlu dipelihara dan dilestarikan, dibuat kebijakan dan strategi, yang aspiratif, partisipatif dan akomodatif untuk menghadapi berbagai perkembangan dan perubahan zaman	BARU	-	Tahun 2025	-	TAHUN 2025

43	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Kaltim	Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim	1. Presiden No. 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional Dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional, pada Pasal 41 ayat (7) Penyusunan rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim provinsi dan kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Dan pada pasal 41 di ayat (8) bahwa Hasil penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menjadi rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim provinsi atau kabupaten/kota. 2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim. Pada BAB V Pasal 16 ayat (1) disebutkan bahwa dalam rangka mendukung keberhasilan penyelenggaraan adaptasi dan mitigasi, Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi dan pada pasal 16 ayat (3) disebutkan Ketentuan mengenai tata cara dan bentuk rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur,	BARU	-	Tahun 2025	-	TAHUN 2025
44	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Kaltim	Rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim	1. Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional Dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional, pada Pasal 27 ayat (3) Gubernur wajib menyusun rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim provinsi paling lambat 6 (enam) bulan setelah rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim nasional ditetapkan Menteri dan ayat (5) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud ditetapkan sebagai rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim provinsi oleh gubernur. 2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim. Pada BAB V Pasal 16 ayat (1) disebutkan bahwa dalam rangka mendukung keberhasilan penyelenggaraan adaptasi dan mitigasi, Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi dan pada pasal 16 ayat (3) disebutkan Ketentuan mengenai tata cara dan bentuk rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.	BARU	-	Tahun 2025	-	TAHUN 2025
45	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kaltim	Tata Cara Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan	berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah Pusat mendelegasikan sebagian kewenangan untuk mendukung pengelolaan Pertambangan mineral dan batubara salah satunya penetapan harga patokan mineral bukan logam, penetapan harga patokan mineral bukan logam jenis tertentu dan penetapan harga patokan batuan	BARU	-	Tahun 2025	-	TAHUN 2025

46	Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim	Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah	menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah	BARU	-	Tahun 2025	-	TAHUN 2025
47	Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Kaltim	Pemberian Kesempatan Menyelesaikan Pekerjaan Melampaui Tahun Anggaran		BARU	-	Tahun 2025	-	TAHUN 2025
48	Biro Kesra Prov. Kaltim	Pelestarian Adat Istiadat, Tradisi Lisan, Ritus dan Manuskrip	bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, Peraturan Daerah No 10 Tahun 2022 tentang Pemajuan Kebudayaan	BARU	-	Tahun 2025	-	TAHUN 2025
49	Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Kaltim	Tim Ahli Gubernur Percepatan Pembangunan Strategis		BARU	-	Tahun 2025	-	TAHUN 2025
50	Badan Pendapatan Daerah Prov. Kaltim	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	BARU	-	Tahun 2025	-	TAHUN 2025
51	Badan Pendapatan Daerah Prov. Kaltim	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Perubahan dari Pergub Nomor 38 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	BARU	-	Tahun 2025	-	TAHUN 2025
52	Badan Pendapatan Daerah Prov. Kaltim	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Dasar Pengenaan Pajak Alat Berat Tahun 2024	Sesuai ketentuan pasal 6 ayat (1) Pergub Nomor 2 Tahun 2025 tentang Dasar Pengenaan PAB Tahun 2024	BARU	-	Tahun 2025	-	TAHUN 2025
53	Badan Pendapatan Daerah Prov. Kaltim	Perubahan Tarif Detail Rincian Objek Retribusi Daerah pada SKPD/UPTD Pemungut Retribusi Daerah	Sesuai ketentuan pasal 69 Perda Prov. Kaltim Nomor 1 Tahun 2024 tentang PDRD menyebutkan Tarif Retribusi ditinjau paling lama 3 Tahun sekali dilakukan dengan memperhatikan indexs harga dan perkembangan perekonomian tanpa melakukan penembahan objek retribusi, dan peruabahan taraiif retribusi tersebut ditetapkan dengan Peraturan Gubernur	BARU	-	Tahun 2025	-	TAHUN 2025
54	Badan Pendapatan Daerah Prov. Kaltim	Penyesuaian Detail Rincian Objek pada BLUD	Sesuai ketentuan pasal 46 ayat (5) dan pasal 49 ayat (5) Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang PDRD menyebutkan dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai ketentuan Peraturan PerundangUndangan	BARU	-	Tahun 2025		TAHUN 2025
55	Badan Pendapatan Daerah Prov. Kaltim	Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Dasar Pengenaan Pajak Alat Berat Tahun 2024	Sesuai Ketentuan Pasal 18 ayat(4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2024 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat Tahun 2024	BARU	-	Tahun 2025		TAHUN 2025
56	Badan Pendapatan Daerah Prov. Kaltim	Dasar Pengenaan Pajak Alat Berat yang tidak tercantum di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2025	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2025 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2025	BARU	-	Tahun 2025		TAHUN 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

NIP. 19690512-198903 2 009

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd
RUDY MAS'UD